

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku atau Sumber Lainnya

Achsin, M. I., & Triyuwono, I. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumanjang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*.

Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2009, Oktober Rabu). *Haryano Umar : Masih Terjadi Information Asymmetry dalam Pengelolaan Aset Negara*. Diambil kembali dari djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2316/Haryono-Umar-Masih-Terjadi-Information-Asymmetry-dalam-Pengelolaan-Aset-Negara.html>

Dr. Wahidmurni, M. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 1.

Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Pres.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2009, Mei Rabu). *Reformasi Birokrasi*. Diambil kembali dari menpan.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>

Pratama, P. W. (2021, November). *Sri Mulyani Ungkap 'Musuh Besar' Pengelolaan Aset Negara*. Diambil kembali dari Bisnis.com:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211115/9/1466036/sri-mulyani-ungkap-musuh-besar-pengelolaan-aset-negara>

Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis*. Jakarta: Indeks.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Kementerian Keuangan 225/PMK.05/2016 tentang Peraturan
Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi
Pemerintah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa
Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset
Tetap Berbasis AkruaI